

Judul : Perlunya Kebijakan Ramah Investasi
Tanggal : Minggu, 19 Nopember 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

NO.15375/TAHUN KE-54 | KAMIS, 9 NOVEMBER 2023

EDITORIAL

Jubah Hakim Zonder Rasa Malu



PUTUSAN Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pada Selasa (7/11) lalu benar-benar menampar wajah Republik ini yang pada Agustus lalu sudah berusia 78 tahun. Bagaimana tidak, MK sebagai lembaga pengadil konstitusi disebut MKMK telah diisi oleh para hakim yang cacat etika dalam putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Uji Materi Syarat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (capres cawapres).

Dalam memutuskan syarat batas usia minimal capres-cawapres itu, sembilan hakim konstitusi dinyatakan melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Utama. Parahnya, pelanggaran paling berat justru dilakukan Ketua MK Anwar Usman.

Sebagai paman dari salah satu bakal cawapres, Anwar Usman divonis MKMK telah membuka ruang intervensi pihak luar dalam pengambilan putusan batas usia minimal capres-cawapres. Adik ipar Presiden Joko Widodo itu dinilai MKMK telah melanggar kode etik berat karena tak mengundurkan diri dalam proses pemeriksaan dan pengambilan putusan atas gugatan yang menyangkut anak Presiden, Gibran Rakabuming Raka, yang maju menjadi bakal cawapres.

Di sini sejatinya sikap kenegarawanan Anwar ditunggu, yakni mengundurkan diri dari pemeriksaan kasus tersebut karena menyangkut kepentingan keponakannya. Di situ etika kenegarawanan Anwar diuji.

Namun, Anwar tetap memilih menangani perkara itu dan ikut mengambil putusan. Prinsip ketakberpihakan, integritas, kecakapan, kesetaraan, independensi, kepastian, dan kesopanan yang tertuang dalam Sapta Karsa Utama ditabraknya.

Putusan MKMK atas Anwar, baik sebagai hakim konstitusi maupun Ketua MK, menunjukkan ipar Presiden itu masih butuh banyak belajar etika. Kepakarannya dalam hukum tata negara masih belum dibarengi dengan etika yang mumpuni.

Alhasil, putusan yang dibuatnya pun sangat diragukan demi kepentingan bangsa dan negara. Namun, yang pasti, dalam putusan syarat batas usia minimal capres-cawapres, kepentingan sang keponakan telah terkomodasi.

Bisa jadi Anwar lupa, sebelum bisa baca-tulis, etika ialah pelajaran pertama kali yang diterimanya dari orangtua di masa kanak-kanak. Siapa pun mendapat pelajaran itu, dengan kadar masing-masing herbeda tentunya, tergantung pada orangtuanya.